

**Bunga Rampai Isu-Isu  
Belanja Pemerintah Pusat  
Seri 01**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN DPR RI  
2018**

# **Bunga Rampai Isu-Isu Belanja Pemerintah Pusat Seri 01**

## **Tim Penyusun**

### **Penanggung Jawab**

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

### **Penulis**

Taufiq Hidayatullah, S.E. & Robby Alexander Sirait, M.E.  
Mujiburrahman, S.E.M.Si & Robby Alexander Sirait, M.E.  
Fajri Ramadhan, S.E. & Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M.  
Iwana Shabahati, S.E & Jesly Yuriaty Panjaitan, S.E., M.M.  
Fransina Natalia Mahudin, S.E & Martha Carolina, SE.,Ak., M. Ak.  
Ricka Wardianingsih, S.E & Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M  
Ollani Vabiola Br.Bangun, M.M & Jesly Yuriaty Panjaitan, M.M  
Maya Melania Oping, S.Pd., MM dan Martha Carolina, SE.,Ak. M.,Ak.

### **Penyunting**

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

### **Desain Sampul**

Slamet Widodo, S.E.,M.E

Cetakan Pertama, April 2018

ISBN : 978 - 602 - 50563 - 3 - 8

Diterbitkan oleh  
Pusat Kajian Anggaran  
Badan Keahlian DPR RI

All rights reserved  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

**PENGANTAR**  
**KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN**  
**BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, buku Bunga Rampai Isu-Isu Belanja Pemerintah Pusat Seri 01 ini dapat diterbitkan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, secara jelas menegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, negara yang diwakilkan oleh Pemerintah harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan proses pembangunan dari masa ke masa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu *tools* yang dapat digunakan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita konstitusi tersebut adalah melalui Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal yang mendistribusikan pendapatan di masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Mengingat begitu pentingnya fungsi APBN dalam mewujudkan cita-cita konstitusi, maka sudah seharusnya APBN dari tahun ke tahun harus dirancang dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu rasanya pengelolaan APBN yang dilakukan oleh Pemerintah terus dilakukan evaluasi-evaluasi dan perbaikan-perbaikan secara terus menerus agar semakin efektif dan efisien.

Berangkat dari pemikiran tersebutlah, buku ini kami susun dan terbitkan. Buku ini akan mengupas beberapa isu-isu strategis terkait

pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dalam APBN yang masih perlu mendapat perhatian, evaluasi dan perbaikan dari Pemerintah. Tersusun dan terbitnya buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN dalam proses pembangunan di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab pertama buku ini mengangkat judul **“Optimalisasi Subsidi Pupuk Melalui Skema Bantuan Langsung”**. Bab ini mencoba mengurai perkembangan pengelolaan dan efektifitas subsidi pupuk di beberapa tahun terakhir, sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan produktivitas pertanian, mewujudkan ketahanan pangan dan tentunya kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Bab kedua mengangkat judul **“Potret Kelistrikan Dan Subsidi Listrik Di Indonesia : Kajian Kebijakan Dan Dampaknya”**. Bab ini mencoba mengurai apakah listrik saat ini sudah tersedia dengan harga yang murah dan terjangkau serta sudah merata dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi, khususnya pasal 33 UUD NRI 1945. Selain itu, bab ini juga akan mengurai tentang pengelolaan subsidi listrik yang merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam penyediaan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bab ketiga mengangkat judul **“Mempertajam Kebijakan Conditional Cash Transfer Indonesia”**. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda besar yang terus diupayakan oleh setiap negara, khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu instrumen yang ditempuh oleh banyak negara dan juga Indonesia adalah penerapan kebijakan *Conditional Cash Transfer* (CCT). Bab ini akan banyak bercerita tentang kondisi

kemiskinan di Indonesia saat ini serta perkembangan dan evaluasi pelaksanaan CCT di Indonesia.

Bab keempat mengangkat judul **“Memeriksa Kesehatan Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional”**. Bab ini mencoba mengurai bahwa dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satu langkah yang ditempuh adalah mengembangkan sistem jaminan sosial, yang kita kenal dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Sistem ini sudah berjalan 4 (empat) tahun hingga saat ini, tetapi masih banyak kendala yang dihadapi. Bab ini mencoba mengurai kendala-kendala yang terjadi dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya yang berkaitan dengan Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai melalui APBN.

Bab kelima mengangkat judul **“Keseimbangan Pembangunan Provinsi Maluku Melalui Intervensi Belanja Pemerintah Pusat”**. Bab ini mencoba mengurai bahwa besarnya perhatian pemerintah saat ini dalam mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendorong laju ekonomi nasional dan perbaikan ketimpangan, tidak akan bermakna jika tidak diimbangi dengan penguatan struktur ekonomi daerah. Penguatan struktur ekonomi daerah tersebut juga harus memperhatikan perbedaan karakteristik daerah, yang pada akhirnya menuntut pendekatan pembangunan dan pola kebijakan yang berbeda-beda pula, khususnya Maluku. Bab ini, akan mencoba mengurai dimana letak penguatan struktur ekonomi yang diperlukan dilakukan untuk percepatan pembangunan di Provinsi Maluku.

Bab keenam mengangkat judul **“Menata Kembali Kebijakan Alur Distribusi Subsidi LPG 3 Kg”**. Bab ini mencoba mengurai apakah penerapan kebijakan subsidi LPG 3 Kg yang sudah dijalankan sejak tahun 2007 sudah sejalan dengan tujuan awalnya, yakni memastikan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah dapat

menjangkau penggunaan LPG yang terjangkau, sebagai akibat program konversi minyak tanah ke LPG yang dilakukan pemerintah. Dalam bab ini akan coba diurai bahwa penerapan subsidi ini masih menemukan berbagai kendala dan cenderung tidak tepat sasaran atau tepat tujuan, yang sebenarnya berpangkal pada pola distribusi terbuka yang diterapkan pemerintah dalam penyalurannya.

Bab ketujuh mengangkat judul **“Perkembangan Program Prioritas Asuransi Nelayan”**. Program asuransi nelayan merupakan suatu bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan nelayan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Asuransi diharapkan menjadi solusi dalam memberikan perlindungan bagi nelayan dan penghasilannya sehingga memberikan jaminan keselamatan kepada nelayan. Bab ini akan mengurai tentang mengapa nelayan membutuhkan asuransi nelayan, bagaimana dampak atas diberlakukannya Program Prioritas Asuransi Nelayan sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 terhadap nelayan serta apa permasalahan yang terjadi terkait program asuransi nelayan yang sedang dijalankan pemerintah saat ini.

Bab terakhir mengangkat judul **“Kajian Penerapan Subsidi Solar Yang Belum Tepat Sasaran”**. Secara teori, pengalokasian subsidi solar dalam APBN oleh pemerintah, salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan pada masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jumlah yang mencukupi dan harga yang terjangkau oleh daya beli yang dimilikinya. Tapi faktanya, tidak demikian. Bab ini akan mencoba mengurai penerapan subsidi solar yang belum sejalan dengan tujuannya tersebut.

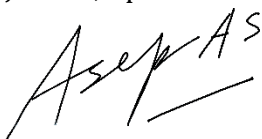
Selain kedelapan bab tersebut, pada bagian akhir buku ini juga kami susun hasil penelitian yang kami lakukan ke Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Kabupaten

Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara terkait efektivitas pelaksanaan subsidi solar bagi nelayan dan kartu asuransi nelayan. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumplemen dan penguat bangunan argumentasi yang diurai pada bab ketujuh dan ke delapan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa isu atau tema yang kami angkat dalam buku ini hanya sebagian dari isu-isu strategis berkaitan dengan pengelolaan Belanja Pemerintah Pusat (BPP). Masih banyak permasalahan atau isu-isu BPP lain yang harus menjadi perhatian pemerintah. Oleh karena itu, kami menyadari buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna.

Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengoptimalkan dan memperkuat peran APBN (khususnya pengelolaan belanja pemerintah pusat) dalam mempercepat proses pembangunan dan mewujudkan cita-cita konstitusi. Berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku-buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Dan terakhir, semoga buku ini mejadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, April 2018

A handwritten signature in black ink that reads "Asep AS". The signature is stylized with a long horizontal stroke at the end.

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

## Daftar Isi

<b>Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I OPTIMALISASI SUBSIDI PUPUK MELALUI SKEMA BANTUAN LANGSUNG .....</b>	<b>1</b>
Taufiq Hidayatullah, S.E. & Robby A. Sirait, M.E.	
<b>BAB II POTRET KELISTRIKAN DAN SUBSIDI LISTRIK DI INDONESIA: KAJIAN KEBIJAKAN DAN DAMPAKNYA .....</b>	<b>18</b>
Mujiburrahman, S.E.M.Si & Robby A. Sirait, M.E	
<b>BAB III MEMPERTAJAM KEBIJAKAN CONDITIONAL CASH TRANSFER INDONESIA .....</b>	<b>38</b>
Fajri Ramadhan, S.E. & Adhi Prasetyo S.W, S.M.	
<b>BAB IV MEMERIKSA KESEHATAN PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL .....</b>	<b>66</b>
Iwana Shabahati, S.E & Jesly Y. Panjaitan, S.E., M.M	
<b>BAB V KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI MALUKU MELALUI INTERVENSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT .....</b>	<b>85</b>
Fransina N.M, S.E & Martha Carolina, SE.,Ak, M. Ak	
<b>BAB VI MENATA KEMBALI KEBIJAKAN ALUR DISTRIBUSI SUBSIDI LPG 3 Kg .....</b>	<b>105</b>
Ricka Wardianingsih, S.E & Adhi Prasetyo S.W, S.M	
<b>BAB VII PERKEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS ASURANSI NELAYAN .....</b>	<b>118</b>
Ollani V Br.Bangun, M.M & Jesly Y. Panjaitan, M.M	
<b>BAB VIII KAJIAN PENERAPAN SUBSIDI SOLAR YANG BELUM TEPAT SASARAN .....</b>	<b>133</b>
Maya M.O, S.Pd., MM & Martha Carolina, SE.,Ak. M.,Ak	



<b>SUPLEMEN</b>	
<b>KAJIAN EFEKTIVITAS SUBSIDI SOLAR BAGI NELAYAN</b>	143
(Studi Kasus Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bulukumba, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Medan) .....	
<b>KAJIAN PROGRAM ASURANSI NELAYAN</b>	151
(Studi Kasus Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bulukumba, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Medan) .....	

